

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. D. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Akinci, G., & Crittle, J. 2008. Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and Implications for Zone Development, Foreign Investment Advisory Service (FIAS). World Bank: Washington, D.C, Occasional Paper.
- Alkadri. A. 2011. Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Di Provinsi Banten. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, vol. 13, no. 1. doi:10.29122/jsti.v13i1.868.
- Damuri, Yose, & Rizal. 2015. Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia. kek.go.id/peta-sebaran-kek, diakses pada 09 Juni 2022, pukul 23.40 WITA.
- Djadjuli, D. 2018. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Hasyim. S. 2008. Penanaman Modal Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Hidayat. S., & Hidayat, A. S. (2010). Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jakarta : Rajawali Pers.
- Hilmiah. 2024. Peran Pemerintah Daerah dalam Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Barru. Tesis M.H. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Makalew, Victoria N., et al. 2017. Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*, vol. 19, no. 2. doi:10.35794/jpek.d.15784.19.2.2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Barru Gandeng PT. KIMA Kelola Kawasan Ekonomi Khusus. <https://humas.sulselprov.go.id/index.php/2020/08/28/barru-gandeng-pt-kima-kelola-kawasan-ekonomi-khusus/>, diakses pada 09 Juni 2022, pukul 00.40 WITA.

- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, Desa Madello, dan Desa Siawung (Kawasan Strategis Emas) Kabupaten Barru.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Emas Garongkong Barru 2014-2034.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- Ramdani. Z. A. 2020. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Planoeearth*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1639>
- Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia: Jakarta.
- Sindonews, Bupati Barru: 3.000 lahan dibebaskan untuk KEK Pelabuhan Garongkong, <https://makassar.sindonews.com/read/706779/713/bupatibarru-3000-hektare-lahan-dibebaskan-untuk-kek-pelabuhan-garongkong-1646744634>, diakses pada 09 Juni 2022, pukul 00.54 WITA.
- Siagian, Sondang P. 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sitorus, Y. L., Lidya Erdawati, & Tri Marno Butarbutar. 2024. Pengaruh Penetapan Kota Batam Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 174-181. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i4.1518>
- Soekanto, S. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. I., & Febriani, R. E. 2020. KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL: SEBUAH STUDI LITERATUR. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 40–54. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10902>
- Syafiie, I. K. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

TinjauanPustaka,[elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1956/8/UNIKOM_SINDY%20SINTI A.N_BAB%20II.pdf](http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1956/8/UNIKOM_SINDY%20SINTI_A.N_BAB%20II.pdf). diakses pada 18 Juli 2022 pukul 21.15 WITA.

TinjauanPustaka,https://repository.uinsuska.ac.id/12570/7/7.%20BAB%20II_2018121ADN.pdf. diakses pada 15 Agustus 2022, pukul 21.15 WITA.

Torang, T. 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi.